Perencanaan Kontinjensi

Tinjauan tentang beberapa Pedoman Perencanaan dan Rencana Kontinjensi

Oktober 2010

Dokumen Kerja No. 26

Baseline - Study

Kerjasama Indonesia - Jerman untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami

gtz IS International Services

Penulis:
Henny Dwi Vidiarina

2010

Kerjasama Indonesia-Jerman untuk
Sistem Peringatan Dini Tsunami (GITEWS)
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal

GTZ-International Services
Menara BCA, lantai 46
Jalan MH Thamrin No 1
Jakarta 10310
Indonesia

T: +6221 23587571
F: +6221 23587570
www.gitews.org/tsunami-kit
www.gtz.de

Daftar Isi

1. Pengantar 2

2. Pedoman Perencanaan Kontinjensi Tsunami Terpilih 3
- a. Inter-Agency Standing Committee (IASC) 3
- b. Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Federasi Internasional) 3
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) 4

3. Tinjauan Pedoman Terpilih 4
- a. Tujuan dan Prinsip Pengembangan Pedoman 4
- b. Konsep-Konsep Utama Pedoman Perencanaan Kontinjensi 5
- c. Proses dan Langkah-Langkah Perencanaan 12
- d. Referensi yang Disediakan dalam Dokumen Pedoman 16

4. Rencana Kontinjensi Tsunami Terpilih 17
- a. Rencana Kontinjensi Tsunami di Indonesia 17
- b. Rencana Kontinjensi Tsunami di Kota Fort Bragg, California 18
- c. Rencana Kontinjensi Tsunami di Distrik Gisborne, Selandia Baru 18

5. Tinjauan Rencana Kontinjensi Tsunami Terpilih 23
- a. Pelaku Kelembagaan, Tujuan & Cakupan 24
- b. Analisis risiko & Penetapan Prioritas 24
- c. Skenario Sebagai Dasar untuk Rencana Kontinjensi Tsunami 25
- d. Sistem & Prosedur Peringatan Dini 26
- e. Prosedur Evakuasi 26

6. Kesimpulan 27

7. Referensi 27

1. Pengantar

Di bulan Mei 2005, pemerintah Indonesia bersama dengan badan-badan PBB mengadakan lokakarya pembelajaran dan praktik terbaik selama dua hari tentang tanggapan nasional dan internasional terhadap bencana tsunami 26 Desember 2004. Sejumlah area masalah utama dan rekomendasinya kemudian digariskan dalam rangkuman lokakarya. Perencanaan kontinjensi adalah salah satu dari lima area pokok yang disepakati (ke emapat lainnya adalah kerja kelembagaan dan legislatif, mekanisme tanggapan, pengaturan siaga, dan peringatan dini/peningkatan kesadaran).

Twigg (2005) dan Choularton (2007), mengatakan bahwa *"...walaupun ada peningkatan nyata dalam kesiapsiagaan; organisasi-organisasi kemanusiaan hampir-hampir tidak mengerjakan perencanaan kontinjensi untuk tsunami besar di Samudera India. Penjelasan yang paling mungkin untuk dilema klasik bagi perencana ini: haruskah Anda menyusun rencana untuk kejadian yang paling sering atau yang paling merusak namu jarang terjadi..."?*

Pelajaran umum dari tsunami Desember 2004 yang diambil oleh para Pemerintah, badan PBB, dan organisasi kemanusiaan adalah bahwa mereka harus memprioritaskan kembali upaya perencanaan kontinjensi guna memastikan bahwa jenis-jenis bencana berpeluang rendah namun meluluhlantakkan, seperti tsunami, diperhitungkan dengan sungguh-sungguh dalam rencana penanggulangan bencana. Sebagian negara atau negara bagian rawan tsunami, termasuk Indonesia, baru-baru ini telah mengembangkan perencanaan kontinjensi tsunami untuk area masing-masing, sementara organisasi kemanusiaan yang bekerja di negara rawan tsunami juga telah membuat kemajuan nyata dalam pengarusutamaan rencana kontinjensi tsunami ke dalam manajemen dan operasi mereka.

Dokumen ini memaparkan tinjauan singkat tentang rencana kontinjensi tsunami yang telah dikembangkan oleh beberapa kabupaten di Indonesia, kota Fort Bragg di California, dan Distrik Gisborne di Selandia Baru. Area-area itu dipilih karena sifat khusus mereka di dalam keterpaparan (*exposure*) terhadap tsunami. Distrik Gisborne dan Kota Fort Bragg dapat terpengaruh baik oleh tsunami jauh maupun tsunami lokal. Negara-negara lain terutama Amerika Serikat dan Jepang juga telah mengembangkan rencana kontinjensi tsunami dalam waktu yang lama, namum mereka menggunakan istilah berbeda, misalnya "rencana tanggap tsunami," atau "kesiapsiagaan tsunami."

Di bagian awal dokumen, penulis akan menguraikan secara singkat pedoman perencanaan kontinjensi, yang dikembangkan oleh *Inter-Agency Standing Committee* (**IASC**), Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (**Federasi Internasional**) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (**BNPB**) Indonesia. Namun, jelaslah bahwa penulis juga menyadari bahwa selain lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, baik lembaga kemanusiaan maupun badan pemerintah di negara lain, telah juga merancang pedoman rencana daruratnya sendiri. Ketiga lembaga di atas dipilih karena menyajikan mandat yang berbeda-beda, IASC menangani pedoman untuk para anggota PBB, Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menangani pedoman untuk anggota mereka serta lembaga swadaya masyarakat, dan BNPB untuk lembaga-lembaga pemerintah.

Di akhir dokumen, penulis memberikan beberapa referensi pedoman perencanaan kontinjensi tsunami yang telah ditinjau dan rencana kontinjensi tsunami.

2. Pedoman Perencanaan Kontinjensi Tsunami Terpilih

a. *The Inter-Agency Standing Committee* (IASC)

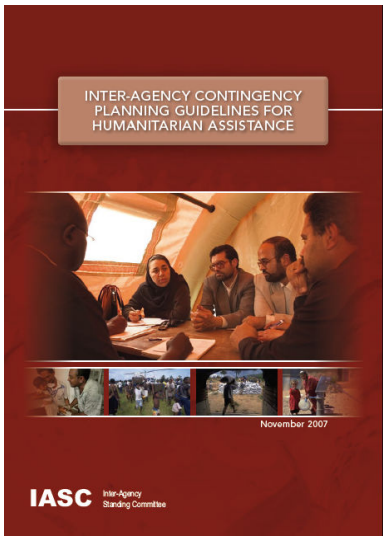

Dibentuk di bulan Juni 1992 sebagai tanggapan atas Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 46/182 tentang penguatan bantuan kemanusiaan. Ini adalah foum antarlembaga yang unik dengan fungsi untuk koordinasi, pengembangan kebijakan, dan pembuatan putusan yang melibatkan para mitra kemanusiaan PBB dan non-PBB utama. Versi pertama Pedoman Perencanaan Kontinjensi Antarlembaga untuk Bantuan Kemanusiaan dikembangkan di tahun 2001. Pedoman ini telah berfungsi sebagai dokumen rujukan pokok bagi perencanaan kontinjensi antarlembaga anggotanya yang bersifat umum. Pedoman telah direvisi di tahun 2007 melalui upaya kolaboratif dan proses konsultatif di bawah panduan Sub-Kelompok Kerja IASC tentang Kesiapsiagaan dan Perencanaan Kontinjensi, yang terdiri atas anggota-anggota dari CARE, ICRC, IFRC, OCHA, UNDP,UNHCR, WHO, dan diketuai bersama oleh WFP dan UNICEF, yang lalu berfungsi sebagai rujukan pokok bagi perencanaan kontinjensi antarlembaga.

b. Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Federasi Internasional)

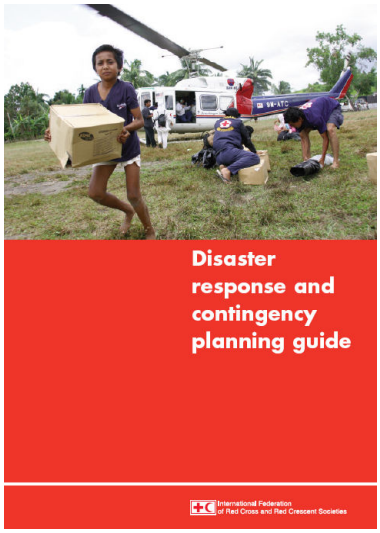

Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), yang didirikan di tahun 1919, adalah organisasi kemanusiaan terbesar di dunia, terdiri atas 186 anggota masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pedoman yang terbit pada tahun 2007 dikembangkan melalui proses dua tahun dialog dan tinjauan sejawat dari para anggota Federasi Internasional. Sejak itu, pedoman itu berfungsi sebagai alat kerja bagi para staf tanggap bencana di dalam Federasi Internasional pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia

UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana mengganti badan penanggulangan bencana sebelumnya Bakornas PB menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) yang baru. Didirikan secara resmi di tahun 2008, BNPB memiliki dua fungsi utama: a) merumuskan dan menerbitkan kebijakan tentang penanganan penanggulangan bencana, serta penanganan populasi yang mengungsi dengan cara yang efektif, dan b) mengoordinasi implementasi kegiatan penanggulangan bencana dengan cara yang terencana, terpadu, dan menyeluruh. Panduan yang dikembangkan di tahun 2008 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Implementasi Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4/2008 tentang Pedoman Perencanaan Penanggulangan Bencana.

3. Tinjauan Pedoman Terpilih

Pedoman Perencanaan Kontinjensi yang dikembangkan oleh **IASC, Federasi Internasional, dan BNPB** ditinjau sesuai dengan topik-topik berikut ini:

a. Tujuan dan Prinsip Pengembangan Pedoman,
b. Konsep-Konsep Utama Pedoman Perencanaan Kontinjensi
c. Proses dan Langkah-Langkah Perencanaan.
d. Referensi yang Disediakan dalam Dokumen Pedoman

a. Tujuan dan Prinsip Pengembangan Pedoman

Ketiga lembaga telah menulis pedoman dengan pemahaman bahwa **pemerintah, baik nasional maupun lokal, memegang tanggung jawab utama** penyediaan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kemudian didukung oleh masyarakat nasional dan internasional. Karena itu, amat penting mengerjakan rencana tanggapan dan kontinjensi **melalui konsultasi dan kerjasama** dengan pemerintah yang akan berkewajiban menerapkan atau menyetujuinya.

Karena hal ini, IASC menggunakan panduan ini untuk menggariskan cara komunitas kemanusiaan internasional dapat mengatur dirinya sendiri untuk **mendukung dan melengkapi** tindakan pemerintah nasional, sementara **Federasi Internasional** memandang perencanaan kontinjensi mereka sebagai kegiatan yang sinambung, yang memampukan *Masyarakat Palang Merah* untuk menguji dan menyempurnakan rencana yang sudah ada, mengintegrasikan mitra baru, serta mengarahkan staf dan sukarelawan seiring dengan waktu **melalui konsultasi dan kerjasama** dengan pemerintah.

Proses perencanaan kontinjensi adalah sama pentingnya dengan Rencana Kontinjensi. Ketiga lembaga merujuk ke dokumen-dokumen mereka sebagai panduan praktis atau

alat kerja, alih-alih aturan ketat, proses perencanaan sama pentingnya dengan rencana itu sendiri.

Kotak 1
Tujuan Pedoman Perencanaan Kontinjensi

IASC: *Sebagai panduan praktis bagi Tim Kemanusiaan Negara yang terlibat dalam penyediaan bantuan dan perlindungan internasional untuk mereka yang terpengaruh oleh kedaruratan*

Federasi Internasional: *Sebagai alat kerja bagi staf tanggap bencana di dalam Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Federasi Internasional yang bekerja pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global.*

BNPB: *sebagai alat bagi semua pelaku yang terlibat dalam pengembangan perencanaan kontinjensi di Indonesia serta menyediakan pengetahuan dan kerangka kerja dalam perencanaan kontinjensi di Indonesia.*

Banyak hasil-hasil perencanaan kontinjensi yang berfaedah datang dari ***proses*** yang dilalui saat mengembangkan rencana. Pentingnya proses tidak berarti bahwa rencana tidak penting. Rencana adalah ukuran kualitas proses. Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan rencana yang baik. Walaupun kedaruratan yang terjadi mungkin sangat berbeda dari yang direncanakan untuk dihadapi, rencana itu tetap akan berguna.

Ketiga lembaga merangkum bahwa Rencana Kontinjensi sebaiknya dicirikan oleh **prinsip-prinsip berikut**:

- Proses pengembangan rencana adalah partisipatif
- Rencana itu berfokus pada bahaya tunggal
- Rencana itu berdasarkan skenario
- Skenario dan tujuan dikembangkan sebagai suatu kesepakatan bersama, sebagai hasil konsesus umum.
- Rencana itu tidak bersifat rahasia/tertutup
- Peran & tanggung jawab harus diidentifikasi
- Rencana itu dibuat untuk menangani keadaan darurat

b. Konsep-Konsep Utama Pedoman Perencanaan Kontinjensi

Pertanyaan utama di bawah ini digunakan sebagai garis besar dalam pembuatan pedoman:

a. Apakah Perencanaan Kontinjensi itu?
b. Mengapa harus menyusun rencana?
c. Kapan harus menyusun rencana?
d. Dengan siapa harus menyusun rencana?
e. Untuk menyusun rencana apa?

Selain itu, pedoman juga menguraikan pengaturan atau manajemen Perencanaan Kontinjensi

Apakah Perencanaan Kontinjensi itu? Definisi Rencana Kontinjensi

Berbagai definisi diberikan oleh UNISDR (Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana PBB), IASC, Federasi Internasional, dan BNPB. Akan tetapi, istilah perencanaan kontinjensi digunakan untuk berbagai kegiatan, dalam konteks yang beragam, untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar tentang situasi yang potensial (jenis-jenis bencana atau krisis lain yang dapat terjadi, yang ditangani dan tindakan yang perlu dilakukan, besarnya biaya yang diperlukan, dsb)

Keberagaman definisi menegaskan kesamaan pemahaman bahwa perencanaan kontinjensi harus mencakup **proses** pengaturan awal sehingga bisa membuat perencanaan atau **menyusun strategi dan prosedur** dalam menanggapi potensi krisis atau kedaruratan yang akan terjadi. Ini termasuk mengembangkan **skenario** (untuk mengantisipasi krisis), menentukan **tanggung jawab** semua pelaku yang akan terlibat mengidentifikasikan peran dan sumber daya, proses pendataan dan penyebaran informasi, dan pengaturan setiap pelaku sehingga siap pada saat dibutuhkan, dan **menentukan kebutuhan** agar tujuan tercapai. Perencanaan kontinjensi merupakan bagian penting dari keseluruhan program kesiapsiagaan dan perlu dikembangkan untuk setiap jenis bahaya, kemudian dimutakhirkan dan dilatihkan secara regular.

Kotak 2
Definisi Perencanaan Kontinjensi

UNISDR: *Proses manajemen yang mengalisis kejadian potensial tertentu atau situasi yang timbul yang mungkin mengancam masyarakat dan lingkungan dan menyusun pengaturan di muka untuk memungkinkan tanggapan yang tepat waktu, efisien, dan patut terhadap kejadian atau situasi seperti itu.*

IASC: *Perencanaan kontinjensi adalah proses membentuk tujuan, pendekatan, dan prosedur program untuk menanggapi situasi atau kejadian yang cenderung terjadi, yang meliputi upaya mengidentifikasi kejadian serta mengembangkan skenario yang mungkin dan rencana yang patut untuk menyiapkan diri terhadap dan menanggapi kejadian itu secara efektif.*

Federasi Internasional: *Berdasarkan kejadian tertentu atau risiko yang diketahui pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global (misalnya gempa bumi, banjir) atau wabah penyakit untuk membentuk prosedur operasional bagi tanggapan, berdasarkan kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang diperkirakan guna memungkinkan tanggapan yang tepat waktu, efektif, dan patut.*

BNPB: *Proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi.*

Perencanaan kontinjensi yang dibuat oleh **IASC** menyediakan kerangka kerja umum dan menyeluruh untuk memandu tindakan bersama antar semua mitra yang mencakup

masing-masing badan dan/atau organisasi serta kelompok sektor/gugus. Perencanaan tersebut tidak bermaksud menggantikan kebutuhan perencanaan masing-masing badan dan/atau organisasi sehubungan dengan mandat dan tanggung jawab mereka di dalam sektor/gugus. Akan tetapi, perencanaan kontinjensi IASC memberikan fokus dan keterpaduan untuk berbagai tingkat perencanaan yang dibutuhkan demi mencapai tanggap kemanusiaan dengan efektif.

Kerangka Kerja Perencanaan Bersama - IASC

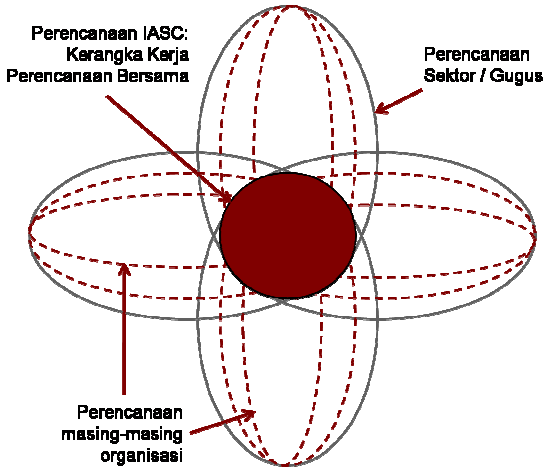

Federasi Internasional menggaris-bawahi perencanaan kontinjensi sebagai bagian dari rencana respon bencana, yang terdiri dari seluruh kegiatan menganitispasi krisis, termasuk menentukan tugas dan tanggung jawab, mengembangkan kebijakan dan prosedur, dan mengidentifikasi serta mengembangkan alat-alat umum untuk respon bencana, sementara perencanaan kontinjensi dibuat untuk suatu kejadian khusus dan menentukan prosedur operasional aksi kemanusiaan terhadap kejadian tersebut.

Federasi Internasional
Hubungan antara perencanaan tanggapan dan kontinjensi dan perencanaan penanggulangan bencana

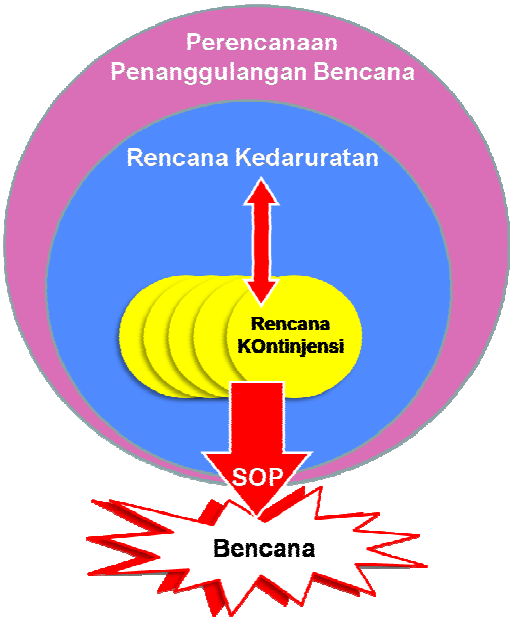

BNPB menyatakan bahwa perencanaan kontijensi yang efektif, akan mampu meminimalisir dampak bencana, mencakup pengembangan skenario dan perkiraan kebutuhan, dana, sumberdaya manusia dan lainnya, dan menentukan mekanisme pengambilan keputusan.

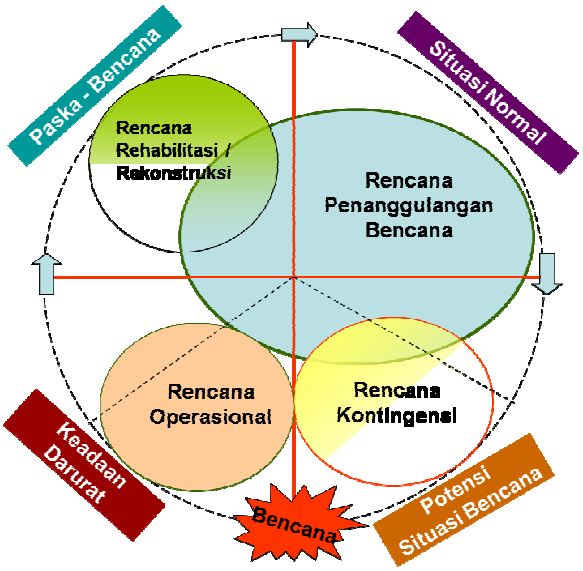

Mengapa Harus Menyusun Rencana? Tujuan Penyusunan Perencanaan Kontinjensi

IASC, Federasi Internasional, dan BNPB memberikan tekanan berbeda dalam menjawab pertanyaan tentang alasan mengapa organisasi harus mengembangkan rencana kontinjensi atau mengapa perencanaan kontinjensi dapat menyelamatkan nyawa orang-orang. Bagaimanapun juga, secara umum mereka meyakini bahwa waktu yang dihabiskan untuk perencanaan tanggap bencana setara dengan waktu yang terselamatkan pada waktu kejadian bencana. Penundaan dalam menyediakan layanan dapat berakibat pada penderitaan yang sia-sia bagi orang-orang dan keluarga yang terkena dampak bencana, dan menciptakan beban tambahan bagi pelaku tanggap bencana. Di dalam keadaan darurat yang sebenarnya, tindakan cepat dan efektif dibutuhkan. Agar hal itu terwujud, tanggap bencana dan rencana kontinjensi serta sumber daya yang diperlukan harus tersedia sebelum bencana terjadi. Perencanaan kontinjensi dapat membantu **mengerahkan tindakan dan sumber daya yang efektif** bagi kedaruratan, mengerahkan **komitmen pelaku** untuk bereaksi terhadap kedaruratan dengan cara yang terkoordinasi, dan mengerahkan kemampuan **menentukan rencana yang kongkrit dan berlanjutan** untuk kedaruratan.

Perencanaan yang dibuat sebelum kejadian kedaruratan memberi peserta waktu berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang mencakup:

- Apakah yang dapat terjadi?
- Apakah dampaknya pada orang-orang yang terkena?
- Tindakan apakah yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan?
- Bagaimanakah cara badan/organisasi akan bekerja bersama?
- Sumber daya apakah yang akan dibutuhkan?
- Apakah yang dapat dilakukan badan/organisasi agar bersiapsiaga dengan lebih baik?

Pengalaman anggota IASC menunjukkan bahwa "***…****Alasan mendasar bagi perencanaan kontinjensi adalah unutk* ***meningkatkan*** *kualitas tanggap kemanusiaan…karena hal itu dapat meningkatkan* ***efektifitass****,* ***kepatutan****, dan* ***ketepatwaktuan*** *didalam tanggap darurat ...."*

Federasi Internasional meyakini bahwa "… *rencana kontinjensi, yang merupakan rencana yang terkoordinasi dengan baik, merupakan tanggap bencana yang* ***efisien dan berhasil*** *...dan membuat operasi bantuan kedaruratan bisa dilakukan secara* ***tepat waktu dan efektif****. Rencana kontingency juga membantu dalam membangun* ***harapan yang realistis****"*

BNPB menyatakan bahwa "… *Alasan bagi rencana kontinjensi adalah untuk* ***memaksimalkan pemakaian*** *sumber daya dan/atau potensi masyarakat dalam menangani bencana/kedaruratan…"* Akan tetapi, berkebalikan dengan kedua lembaga lainnya, BNPB menganggap bahwa rencana kontinjensi itu lebih tepat bagi bencana dengan **skala besar**, yang menyiratkan bahwa bencana dengan skala lebih kecil tidak mesti membutuhkan perencanaan kontinjensi, karena mereka mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki prosedur dan kebijakan sendiri mengenai hal itu.

Kapan Harus Menyusun Rencana?

IASC, Federasi Internasional, dan BNPB menekankan lebih baik memiliki rencana saat tidak diperlukan daripada tidak memilikinya saat benar-benar diperlukan. Perencanaan kontinjensi dikerjakan secara khusus untuk krisis yang sedang timbul atau diperkirakan. Pada umumnya, perencanaan kontinjensi harus segera dimulai ketika potensi bencana yang merusak teridentifikasi, baik itu jenis bencana yang sering maupun jarang terjadi.

Proses kontinjensi mungkin saja dipicu oleh tanda-tanda peringatan dini, khususnya untuk kejadian yang datangnya lambat seperti kekeringan, letusan gunung berapi, dan epidemik. Namun bagaimanpun juga, bencana yang jarang terjadi tapi sangat merusak seperti tsunami perlu segera dibuat ketika hasil kajian bahaya dan risiko mengindikasikan adanya potensi ancaman tersebut.

Peringatan dini merupakan alat penting untuk menentukan pengambilan tindakan secara detil. Perencanaan kontinjensi berubah menjadi aksi terencana ketika peringatan dini keluar dan mengindikasikan bencana akan segera tiba.

Kotak 3
Kapan harus menyusun rencana kontinjensi?

IASC: *Peringatan dini adalah alat penting untuk membantu menentukan kapan perlu merinci proses perencanaan kontinjensi.*

Federasi Internasional: *Perencanaan respon bencana dan kontinjensi adalan proses yang perlu dilakukan terus menerus.*

BNPB: *Perencanaan Kontinjensi dibuat segera setelah peringatan dini diterbitkan atau ketika peluang terjadinya sebuah kejadian bencana yang merusak cukup tinggi*

Rencana ini harus dikaji, ditinjau, diuji, dan dipebarui secara rutin untuk memvalidasi relevansinya. Waktu yang baik untuk memutakhirkan rencana adalah setelah bencana besar terjadi. Kejadian ini juga menjai saat yang baik untuk memicu pembuatan renacana baru jika belum ada rencana yang pernah dibuat.

Dengan siapa harus menyusun rencana?

Mengembangkan sebuah rencana merupakan kerjasama tim. Agar proses perencanaan tetap terkendali, kelompok kerja khusus harus dibentuk, terdiri dari perwakilan masyarakat dan pemerintah sebagai perwujudan tanggung jawab bersama di antara pemerintah dan masyarakat dalam kesiapan bencana. Uraian terinci BNPB dapat menjadi contoh yang baik tentang pelaku-pelaku yang perlu terlibat dalam rencana kontinjensi yaitu dari kalangan lembaga pemerintah, Angkatan Bersenjata, Polisi Nasional, LSM, Universitas, sektor swasta, organisasi masyarakat, media, pemimpin keagamaan dan/atau terkemuka, pramuka, serta pelaku-pelaku lainnya. Semua wakil lembaga-lembaga di atas harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam bidang masing-masing serta kewenangan dan pengambilan putusan.

Masukan dan dukungan juga dibutuhkan dari berbagai orang di berbagai jabatan, yang lalu akan memberikan bantuan yang penting dan tak ternilai kepada mereka yang terlibat dalam perencanaan kontinjensi. Orang-orang ini mencakup mereka di berbagai sektor pemerintah, perusahaan milik negara, perusahaan swasta, LSM, badan internasional dan masyarakat sendiri. Sebuah sistem dan mekanisme penyebaran informasi yang cemerlang harus dibuat guna memastikan bahwa semua pelaku yang terkait mendapatkan cukup informasi.

IASC menekankan lebih jauh bahwa kapan saja mungkin, perencanaa kontinjensi harus melibatkan pemerintah karena merekalah yang memegang tanggung jawab utama untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kotak 4
Dengan siapa harus menyusun rencana?

IASC: *Perencanaan kontinjensi paling efektif ketika prosenya bersifat partisipatif, mencakup semua pihak yang nantinya wajib bekerja bersama dalam kejadian kedaruratan*

Federasi Internasional: *Perencanaan yang paling efektif adalah ketika prosesnya bersifat partisipatif yang (idealnya) melibatkan semua pelaku yang akan diwajibkan untuk bekerja bersama dalam kejadian kedaruratan*

BNPB: *Perencanaan kontinjensi harus dibuat bersama semua pemangku kepentingan dan berbagai sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana*

Karena rencana kontinjensi adalah dokumen dinamis yang membutuhkan penyesuaian dan adaptasi yang berlanjut, para perencana diwajibkan untuk mendorong semua lembaga yang terkait dan para wakil mereka, yang harus menyetujui dan/atau menerapkan komponen rencana, untuk menyumbangkan masukan, memberikan kritik, diskusi, dan saran. Semua hasil dan putusan mereka yang relevan perlu disebarkan dan disampaikan kepada publik.

Untuk menyusun rencana apa?

Kotak 5 menguraikan bahwa perencanaan kontinjensi dibuat untuk semua jenis kedaruratan. Pelajaran umum dari tsunami Desember 2004 yang diambil oleh para Pemerintah, badan PBB, dan organisasi kemanusiaan menyimpulkan bahwa mereka perlu memprioritaskan kembali upaya perencanaan kontinjensi dan memastikan bahwa jenis-jenis bencana berpeluang rendah namun sangat merusak, misalnya tsunami, juga termasuk kedalam rencana penanggulangan bencana.

IASC lebih jauh menyarankan bahwa perencanaan kontinjensi harus berfokus pada situasi yang berskala besar dan potensi dampak kedaruratan membutuhkan tindakan dari sejumlah badan/organisasi. Sama pentingnya adalah bahwa pelaku kemanusiaan juga perlu menyiapkan rencana untuk situasi yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menjaga operasi termasuk situasi yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan staf.

Kotak 5
Untuk menyusun rencana apa

IASC: *Untuk menyusun rencana semua jenis kedaruratan, yang mencakup kedaruratan yang kompleks, bencana alam dan lingkungan, dan krisis besar lainnya yang harus ditanggapi masyarakat kemanusiaan*

Federasi Internasional: *Untuk menyusun rencana untuk semua jenis kedaruratan kemanusiaan, yang mencakup kedaruratan yang kompleks, bencana alam dan lingkungan, dan krisis besar lainnya*

BNPB: *Menyusun rencana untuk kejadian berskala besar dan merusak*

IASC dan Federasi Internasional memandang bahwa perencanaan kontinjensi dikembangkan untuk semua jenis kedaruratan, sementara implementasi masing-masing organisasi anggotanya mungkin kemudian berbeda sesuai dengan tingkat mandat serta kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

BNPB menganggap bahwa Rencana Kontinjensi lebih tepat untuk bencana dengan skala dan dampak besar; akan tetapi, dokumen tidak memperjelas dengan lebih terinci jenis kejadian yang membutuhkan intervensi melalui perencanaan kontinjensi

c. Proses dan Langkah-Langkah Perencanaan kontinjensi

Ketiga organisasi di atas memasukkan aspek-aspek berikut dalam **proses** perencanaan kontinjensi:

- Menganalisis potensi kedaruratan;
- Mnganalisis potensi dampak kemanusiaan dan konsekuensi kedaruratan yang teridentifikasi;
- Menyusun tujuan, strategi, kebijakan dan prosedur yang jelas dan menegaskan tindakan kritis yang harus diambil guna menanggapi suatu kedaruratan, dan;
- Memastikan bahwa kesepakatan terekam dan tindakan yang perlu diambil guna menyempurnakan kesiapsiagaan.

Proses IASC berfokus lebih pada kolaborasi antarlembaga, baik dalam penyusunan rencana maupun dalam penerapan. Modelnya terdiri atas **enam langkah**.

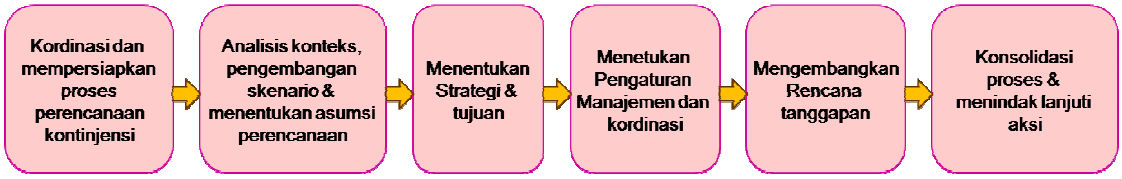

1. Menyiapkan dan Menyelenggarakan Proses Perencanaan Kontinjensi. Sasaran dibatasi dan peran serta ditentukan, jadwal ditetapkan, serta tugas dan tanggung jawab didokumentasi.

2. Analisis Bahaya dan Risiko, Penyusunan Skenario, Pengembangan Asumsi Perencanaan. Analisis tersebut dikembangkan untuk memberikan perencana pemahaman yang kuat tentang bahaya yang dihadapi masyarakat, dan dampaknya.

3. Menentukan Tujuan dan Strategi Tanggapan. Skenario lalu dikembangkan, yang digunakan untuk menetapkan tujuan dan intervensi strategi.

4. Menentukan Pengaturan Manajemen dan Koordinasi untuk Tanggap Kemanusiaan. Disini, manajemen dan mekanisme koordinasi ditetapkan.

5. Mengembangkan Rencana Tanggapan. Rencana tanggapan dikembangkan, yang mana di dalam konteks IASC biasanya berarti bahwa masing-masing sektor atau gugus mengembangkan rencana atau program layanan khusus yang diyakini perlu, sesuia dengan skenario yang telah disepakati bersama.

6. Menerapkan Kesiapsiagaan. Akhirnya, rencana-rencana tanggapan setiap sektor dan badan dikonsolidasikan dan diperiksa untuk memastikan bahwa rencana mereka konsisten dengan tujuan dan strategi keseluruhan, dan dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan di langkah sebelumnya.

Proses Federasi Internasional berfokus pada penyusunan rencana bersama, berbagi dan menyilang informasi di antara sektor, serta berfokus pada koordinasi, dan kerjasama. Sektor-sektor utama yang dirujuk oleh Federasi Internasional adalah kesehatan, pangan dan gizi, bantuan kedaruratan, mta-pencaharian, naungan, air/sanitasi, dan peningkatan higiene, keselamatan, keamanan, dan perlindungan. Modelnya terdiri atas **enam langkah**.

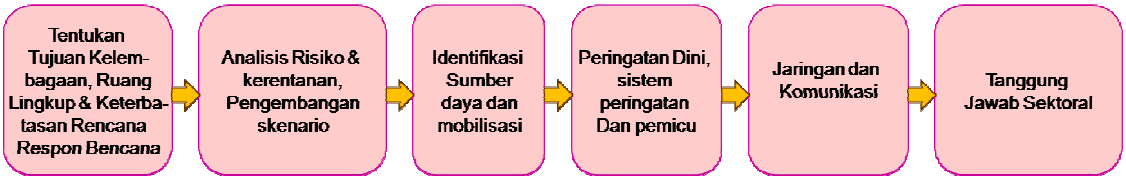

1. Penyusunan rencana bencana kelembagaan. Menentukan mandat kelembagaan, serta kerangka kebijakan dan hukum yang akan menjadi dasar bagi anggota Federasi Internasional untuk rencana tanggapan dan kontinjensi.

2. Analisis Bahaya dan Risiko, Penyusunan Skenario, Pengembangan Asumsi Perencanaan. Analisis tersebut dikembangkan untuk memberikan perencana pemahaman yang kuat tentang bahaya yang dihadapi masyarakat, dan dampaknya.

3. Identifikasi dan pengerahan sumber daya. Mengenali secara terinci potensi kebutuhan kemanusiaan, tindakan dan sumber daya yang dibutuhkan (yang mencakup kapasitas, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya), serta kendala dan kesenjangan.

4. Peringatan dini, sistem peringatan, dan pemicu. Peringatan dini digunakan sebagai informasi dasar, khususnya untuk pengembangan skenario. Penafsiran yang hati-hati atas tanda-tanda peringatan dini dibutuhkan untuk memverifikasi informasi dan menganalisis implikasi guna membenarkan inisiasi atau implementasi rencana kontinjensi yang mencakup potensi strategi tanggap bencana dan prosedur operasi standar (SOP).

5. Saling kerjasama dan komunikasi. Penyusunan rencana bersama, berbagi dan menyilang informasi di antara sektor-sektor, koordinasi, serta kerjasama adalah esensial, karena semua sektor saling mengait dan mempengaruhi.

6. Tanggung jawab di antara sektor-sektor. perencanaan tanggap bencana dan kontinjensi perlu berisi rangkuman mengenai cara kebutuhan dan fungsi di antara sektor-sektor akan ditangani, termasuk di dalamnya pembagian tugas dan tanggung jawab, persiapan kelembagaan, tindak lanjut, evaluasi, dan pemutakhiran rencana.

Proses BNPB berfokus pada kelompok kerja yang terdiri atas berbagai perwakilan masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk nyata akan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Modelnya terdiri atas **tujuh langkah**

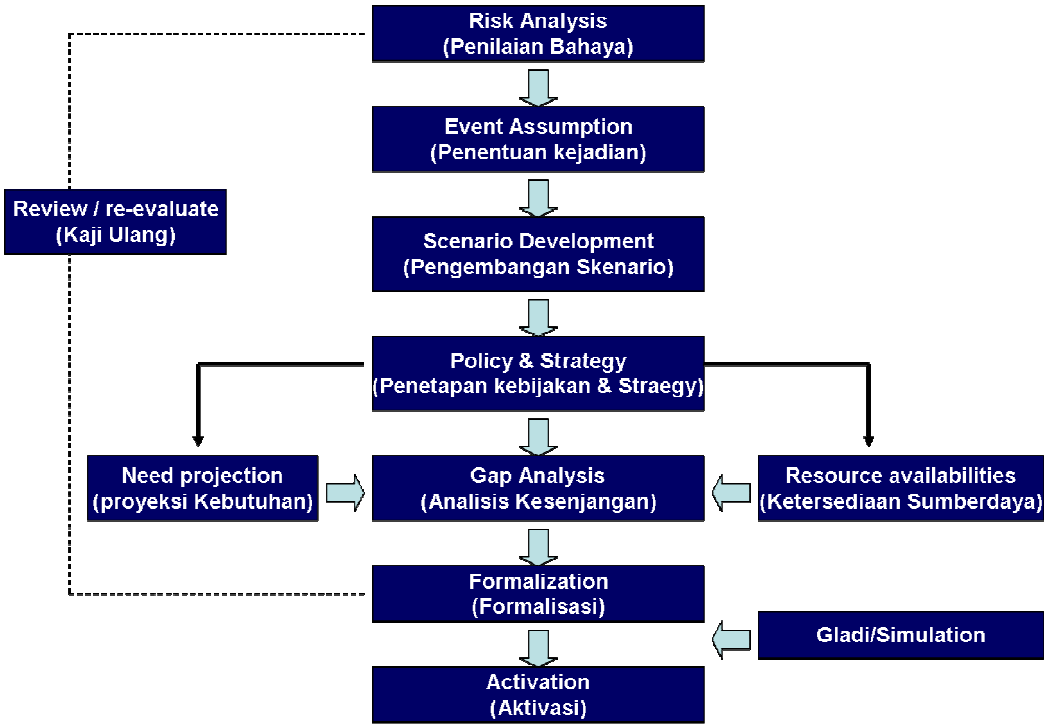

1. Analisis risiko. Tahap ini melakukan pengumpulan informasi yang cukup mengenai bahaya, risiko, dan kerentanan yang terkait dengan kejadian kedaruratan yang diprediksikan.

2. Asumsi Kejadian. Menentukan akar penyebab kejadian, cara kejadian akan berlangsung dan gejala yang dapat diamati yang akan mengisyaratkan kejadian yang akan terjadi.

3. Pengembangan skenario. Beberapa skenario dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai bentuk kejadian darurat yang diramalkan menggunakan dimensi-dimensi waktu, ruang, dan magnitut sebagai parameter. Skenario ini harus juga memproyeksikan dampak bencana pada nyawa manusia, perumahan, harta benda, nafkah, dan infrastruktur serta kejadian pemicu terkait dan ambang atau *threshold* untuk pengaktifan sistem tanggap darurat.

4. Identifikasi Kebijakan & Strategi. Kegiatan tanggap bahaya dan kontinjensi memerlukan sebuah visi. Pada tingkat nasional, terdapat kebijakan dasar untuk penanggulangan bencana yang juga memberikan platform yang dibutuhkan bagi perencanaan kontinjensi. Beberapa contoh mencakup Keputusan Presiden Nomor 03/2001 dan Undang-Undang Nomor 24/2007.

5. Analisis Kesenjangan. Tahap ini berfokus pada analisis dan pengaturan di antara sektor-sektor, menjawab pertanyaan tentang penampilan setiap sektor saat kedaruratan terjadi, menetapkan tujuan sektor, menentukan indikator di antara sektor, menentukan kebutuhan dengan membandingkan sumber daya yang ada dengan kebutuhan yang diproyeksikan, dan menggambar bagan arus untuk kegiatan sektor dan cara tugas-tugas disebarkan kepada anggota sektor.

6. Perumusan rencana ke depan. Tahap ini merupakan rangkaian konsolidasi mulai dari menyusun draf sampai merampungkan Rencana Kontinjensi. Rencana kontinjensi yang baik harus membatasi tugas dan fungsi dan memperjelasnya sedini mungkin.

7. Pengesahan dan Pengaktifan. Rencana akhir harus diserahkan kepada otoritas yang terkait, yakni kepada Kepala BPBD, Walikota, dan DPRD. Pengesahan sedemikian sangat penting untuk memastikan komitmen kelembagaan dari para pihak yang terlibat dan menjadikan rencana kerja tidak sekedar bersifat akademis tetapi menjadi rencana tindakan resmi. Sama pentingnya adalah bahwa pengesahan ini akan memberikan pembenaran bagi otoritas lokal dimana di dalam situasi kedaruratan, jumlah sumber daya yang sudah direncanakan bisa dikeluarkan dengan segera. Pengesahan resmi juga akan mendorong otoritas memandang rencana dengan sungguh-sungguh dan berperan serta dalam pemantauan peringatan dini serta pernyataan keadaan darurat nantinya, jika diperlukan.

Proses Perencanaan kontinjensi		
IASC	**Federasi Internasional**	**BNPB**
Bagian 3: Proses Perencanaan 1. Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Proses Perencanaan Kontinjensi 2. Analisis Bahaya dan Risiko, Pengembangan Skenario dan Pengembangan Asumsi Perencanaan	**Bab 2:** Langkah-langkah untuk mengembangkan rencana tanggap bencana dan kontinjensi Langkah 1: Perencanaan bencana dari lembaga Langkah 2: Analisis bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko	**Bab 5:** Proses Perencanaan Kontinjensi 1. Analisis Risiko 2. Menentukan kejadian 3. Pengembangan skenario 4. Menetapkan kebijakan dan strategi 5. Perencanaan sektor 6. Sinkronisasi/harmonisasi 7. Formalisasi **Bab 6** Perencanaan tindak

Proses Perencanaan kontinjensi		
IASC	**Federasi Internasional**	**BNPB**
3. Perencanaan Tanggapan - Menentukan Tujuan dan Strategi Tanggapan - Menentukan Pengaturan Manajemen dan Koordinasi untuk Tanggap Kemanusiaan - Mengembangkan Rencana Tanggapan 4. Menerapkan Kesiapsiagaan **Bagian 4:** Rencana KOntinjensi (sebuah matriks yang menguraikan rangkuman keluaran utama proses perencanaan yang harus didokumentasi)	Langkah 3: Identifikasi dan pengerahan sumber daya Langkah 4: Peringatan dini, sistem peringatan, dan pemicu Langkah 5:Saling kerjasama dan komunikasi Langkah 6: Tanggung jawab di antara sektor-sektor **<u>Informasi pendukung</u>** **Bab 3** - Koordinasi internal dan eksternal - Koordinasi internal - Koordinasi eksternal **Bab 4** - Implementasi dan tindak lanjut rencana - Pelatihan dan penyadaran tanggap bencana dan rencana kontinjensi - Latihan dan simulasi - Memutakhirkan dan mengevaluasi rencana **Bab 5** - Standar, akuntabilitas, dan pengaitan rencana - Standar dan akuntabilitas - Keterkaitan dan saling kerjasama di antara alat-alat nasional, regional, dan internasional (lokal hingga global)	lanjut 1. Simulasi 2. Pemutakhiran data 3. Transisi 4. Masuk kembali

d. Referensi yang Disediakan dalam Dokumen Pedoman

.

Lampiran		
IASC	**Federasi Internasional**	**BNPB**
1. Arus Kerja Perencanaan Kontinjensi Antarlembaga Menyeluruh 2. Panduan Curah Gagasan Perencanaan Kontinjensi Antarlembaga dan Daftar Periksa Rencana Kontinjensi 3. Kerangka Acuan Kerja	1. Rencana tanggap bencana dan kontinjensi –Struktur yang dianjurkan/isi minimum 2. Peran dan mandat 3. Kontak darurat 4. Analisis bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko	1. Contoh Garis Besar, Daftar Isi 2. Contoh pernyataan, dari pelaku yang terlibat 3. Contoh formulir, matriks profil kelembagaan dalam perencanaan kontinjensi

Lampiran		
IASC	**Federasi Internasional**	**BNPB**
untuk Kelompok Kerja Perencanaan Kontinjensi Antarlembaga 4. Kerangka Acuan Kerja Generik untuk Pemimpin Sektor/Gugus 5. Daftar Pemimpin Sektor/Gugus Global 6. Referensi Perencanaan Kontinjensi 7. Glosarium Terpilih	5. Penyusunan skenario 6. Area intervensi (berdasarkan kapasitas dan sumber daya) 7. Area intervensi lokal-global 8. Informasi penting 9. Peran keorganisasian multisektor 10. Kesiapsiagaan dan pembangunan kapasitas 11. Bahaya potensial regional Kesiapsiagaan prabencana untuk tanggapan 12. Prosedur operasi standar (SOP) - Sampai 24 jam – Tanggapan awal - 24 jam hingga akhir minggu 1 - Akhir minggu 1 hingga akhir kedaruratan	

4. Rencana Kontinjensi Tsunami Terpilih

a. Rencana Kontinjensi Tsunami di Indonesia

BNPB telah memfasilitasi lokakarya perencanaan kontinjensi di beberapa propinsi dan kabupaten rawan bencana. Lokakarya-lokakarya itu telah dianggap sebagai proses penyusunan rencana yang lalu didokumentasi sebagai rencana kontinjensi untuk masing-masing area.

Beberapa daerah telah mengembangkan rencana kontinjensi untuk tsunami seperti nampak pada tabel di bawah ini:

Provinsi/Kabupaten	Topik	Fasilitator	Produk
Kabupaten Pesisir Selatan	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kota Padang	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Pariaman	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Pasaman Barat	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Mentawai	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Sukabumi	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Garut	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Ciamis	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami

Kabupaten Tasikmalaya	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Kebumen	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Cilacap	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA-Bakornas PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Bantul	Gempa Bumi/ Tsunami	Pemerintah Provinsi DIY	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Kulonprogo	Gempa Bumi/ Tsunami	Pemerintah Provinsi DIY	RD Gempa-Tsunami
Provinsi Sumatera Barat	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA,UICT,SCDRR, BAKORNAS PB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Muko-Muko	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA,UNICEF,SCDRR,BNPB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Bengkulu	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA,UNICEF,SCDRR,BNPB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Bengkulu Utara	Gempa Bumi/ Tsunami	OCHA,UNICEF,SCDRR,BNPB	RK Gempa-Tsunami
Kabupaten Gunungkidul	Gempa Bumi/ Tsunami	Pemerintah Provinsi DIY	RK Gempa-Tsunami

Catatan: tabel diatas perlu dimutakhirkan karena beberapa kegiatan serupa yang sedang berlangsung masih dilakukan di berbagai area.

Pengarang telah memilih lima rencana kontinjensi tsunami yang paling baru dikembangkan, yakni:

- Rencana Kontinjensi Tsunami Kabupaten Bantul, November 2007
- Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat, Maret 2008
- Rencana Kontinjensi Tsunami Kabupaten Muko-Muko, Agustus 2008
- Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Bengkulu, Februari 2009
- Rencana Kontinjensi Tsunami Kabupaten Gunungkidul, Februari 2009

b. Rencana Kontinjensi Tsunami Fort Bragg, California

"*Tsunami Contingency Plan*", **Fort Bragg, California**, diamendemen pada tanggal 19 April 2006**.** Dokumen ini diawali oleh Sersan Mary Miler dan Letnan Floyd Higdon dari Departemen Kepolisian Fort Bragg pada tanggal 1 Januari 2006. Empat bulan kemudian, dokumen diamendemen oleh Juru Tulis Pemerintah Kota Cynthia Van Wormer dan Manajer Kota Linda Ruffing pada tanggal 19 April 2006.

c. Rencana Kontinjensi Tsunami di Distrik Gisborne, Selandia Baru

"*Gisborne CDEM Group Tsunami Contingency Plan*", **Distrik Gisborne, Selandia Baru**, 18 Januari 2005, terakhir dimutakhirkan di bulan Januari 2009. Dokumen ini yang aslinya berjudul "*Emergency Services Tsunami Contingency Plan*" disiapkan oleh Layanan Kedaruratan Distrik Gisborne di bulan Januari 2005, empat tahun kemudian dokumen dimutakhirkan oleh Pertahanan Sipil dan Manajemen Kedaruratan yang baru saja dibentuk dan diganti namanya menjadi Gisborne CDEM Group Tsunami Contingency Plan.

Tabel di bawah menguraikan garis besar Rencana Kontinjensi Tsunami yang dikembangkan oleh ketiga negara.

Indonesia (Bantul-2007, Sumatera Barat-2008, Muko-Muko-2008, Bengkulu-2009, Gunungkidul-2009)	**Departemen Kepolisian Fort Bragg** 1 Januari 2006	**Distrik Gisborne** 18 Januari 2005, dimutakhirkan Januari 2009
1. **Pengantar**	**Maksud** - Menyediakan panduan kepada staf Kota dan Departemen Kepolisian mengenai prosedur untuk digunakan selama kejadian Waspada Tsunami - Membahas evakuasi publik - Rencana ini dapat diubah dan dianut untuk penggunaan bagi setiap bencana besar	1. **Pengantar** - Rencana ini adalah untuk Tsunami Jauh dan Lokal - Rencana ini adalah prosedur gabungan yang akan digunakan Layanan Kedaruratan Distrik Gisborne, yang dikenal sebagai Kepolisian, Pemadam Kebakaran, Kesehatan, dan Pertahanan Sipil, dalam kemitraan untuk menyediakan tanggapan yang terkoordinasi.
1. Umum - Profil geografis - Profil administratif - Profil demografis - Kondisi cuaca - Profil ekonomi - Profil Satlak - Siklus penanggulangan bencana - Zona bahaya tsunami - Area evakuasi **2. Mengukur Risiko dan Mendefinisi Kejadian** Pengukuran risiko menggunakan tabel peluang & skala dampak **3. Pengembangan skenario** (berdasarkan kesepakatan yang diturunkan dari pengukuran risiko) - kejadian (kekuatan gempa bumi, episentrum, waktu perjalanan tsunami, pelandaan, area tergenang) - dampak (orang, fasilitas publik, ekonomi, bangunan pemerintah, lingkungan) **4. Kebijakan dan strategi** 5. **Rencana Sektor** - Manajemen dan koordinasi	1. **Umum** (informasi dasar tentang bahaya tsunami; gempa bumi yang bisa menimbulkan tsunami jauh dan/atau lokal di dalam konteks Kota Fort Bragg) 2. **Skenario** untuk Tsunami akibat **Gempa Bumi Lokal** dan Peran Personel Kota dan Departemen Kepolisian 3. **Area Cakupan** (di dalam batas-batas kota Fort Bragg, dan sebagian pelabuhan Noyo dan Noyo Jetty.) 4. **Sistem Peringatan dari Pusat Peringatan** (pembagianpekerjaan di antara WCATWC & PTWC dalam pemberitahuan peringatan, tugas-tugas yang mungkin bertumpang tindih di antara keduanya, produk peringatan yang mencakup lima jenis pesan dan warta yang diterbitkan oleh WCATWC) 5. **Skenario** untuk warta **Gempa Bumi Jauh** dan peran Perwira Penegak Hukum yang Bertugas dalam putusan evakuasi, penyebaran peringatan menggunakan Rencana Operasi Darurat, metode penyebaran pemberitahuan evakuasi 6. **Tindakan Departemen Kepolisian saat menerima waspada tsunami / warta peringatan** mencakup pembagian tugas Pusat Komunikasi Kantor Sherif Mendocino County, Penyelia Sif atau Perwira	2. **Tanggung jawab** - Koordinasi - Polisi Selandia Baru - Layanan Pemadam Kebakaran - Pemadam Kebakaran Pedesaan - Perawatan Kesehatan Tairawhiti - Dewan Distrik Gisborne (Pertahanan Sipil) - Telepon Keselamatan - Badan Pemerintah - Logistik - Kesejahteraan - Media - Pemantauan Kejadian dan Laporan Dampak - Tim Manajemen Kejadian 3. **Prioritas/Strategi Operasional** - Prioritas & Strategi yang Terbentuk - Sistem/Prosedur Peringatan (Tsunami yang Lokal & Jauh) - Tindakan Pradampak (Satu langkah untuk Tsunami Lokal; Empat langkah untuk Tsunami Jauh)

Indonesia (Bantul-2007, Sumatera Barat-2008, Muko-Muko-2008, Bengkulu-2009, Gunungkidul-2009)	**Departemen Kepolisian Fort Bragg** 1 Januari 2006	**Distrik Gisborne** 18 Januari 2005, dimutakhirkan Januari 2009
- SAR (Cari dan Selamatkan) - Sosial & Keamanan - Kesehatan - Transportasi - Logistik 6. **Pemantauan & Tindak Lanjut** 7. **Komentar Penutup**	yang Bertugas, Kepala Polisi, dan Letnan Polisi: - Pemberitahuan Manajer Kota atau pengemban tugasnya - Memastikan bahwa Kepala Pemadam Kebakaran Distrik atau pengemban tugasnya diberi tahu - Menentukan bersama Manajer Kota dan Kepala Pemadam Kebakaran Distrik (jika dapat dilakukan) bilamana pemberitahuan dan/atau evakuasi publik dibutuhkan segera - Mengkaji tugas evakuasi yang perlu diambil - Menjalankan prosedur pemberitahuan evakuasi publik, jika perlu 7. **Pemberitahuan kepada publik** Menguraikan pembagian pekerjaan di antara Penyelia Polisi berpangkat tinggi, Manajer Kota / Direktur Layanan Kedaruratan, dan kesatuan keselamatan publik kota **8. Area rendah yang ditetapkan** Daftar area rendah yang ditetapkan di dalam Kota Fort Bragg, mencakup semua area di bawah ketinggian 60 kaki. **9. Jalur evakuasi** Daftar Jalur Evakuasi & cara mengevakuasi **10. Orang dengan ketunadayaan** Kriteria & tip evakuasi	- Rangkuman Tindakan untuk kejadian yang dipastikan berdasarkan penerima peringatan - Tanggung Jawab Sistem Peringatan PTWC – Pusat Peringatan Tsunami Pasifik MCDEM – Kementerian Pertahanan Sipil & Manajemen Kedaruratan Dewan Distrik Gisborne (Pertahanan Sipil) 4. **Prosedur Evakuasi** (mencakup peran Polisi, Layanan Pemadam Kebakaran, dinas kesehatan dan manajemen kedaruratan) - Pernyataan - Penentuan Waktu Evakuasi - Tindakan Operasional (Kejadian yang Dibangkitkan Secara Lokal & Kejadian yang Dibangkitkan Jauh, area potensial untuk evakuasi) - Prosedur Semua Aman (All Clear) - Stasiun radio 5. Rencana **Pemantauan, Pengujian, dan Evaluasi**
Lampiran 1. Daftar peserta lokakarya Perencanaan	**Adendum** 1. Contoh formulir pengumuman media	**Lampiran**: 1. Efek pada Distrik

Indonesia (Bantul-2007, Sumatera Barat-2008, Muko-Muko-2008, Bengkulu-2009, Gunungkidul-2009)	**Departemen Kepolisian Fort Bragg** 1 Januari 2006	**Distrik Gisborne** 18 Januari 2005, dimutakhirkan Januari 2009
Kontinjensi **2.** daftar wakil sektor **3.** Daftar Kelompok Kerja **4.** Peta Tematis (jika tersedia) **5.** profil lembaga yang terkait dengan rencana kontinjensi **6.** Surat kesepakatan peserta	2. Penyadaran/pendidikan publik - informasi umum - membangun kit darurat 72 jam untuk keluarga 3. Daftar alamat situs web yang menyediakan informasi bermanfaat	2. Rencana Tindakan / Daftar Periksa Tsunami 3. Pusat Kesejahteraan 4. Rangkuman Tindakan Evakuasi 5. Formulir Rinciann Informasi Tsunami 6. Selebaran untuk mereka yang dievakuasi selama kejadian tsunami jauh **Catatan:** dokumen pertama yang dikembangkan di tahun 2005 diletakkan dalam bab 2: **Efek pada Distrik** (informasi dasar tentang bahaya tsunami; gempa bumi yang bisa menimbulkan tsunami jauh dan/atau lokal di dalam konteks Kota Fort Bragg) - Skenario untuk pantai timur, distrik, dan kota - Aset dan area rentan bergantung pada ukuran gelombang yang dibangkitkan oleh tsunami lokal/jauh - Aset dan area yang rentan bergantung pada ukuran gelombang yang dibangkitkan oleh tsunami lokal/jauh - Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam kesiapsiagaan dan kesadaran tentang evakuasi - Skenario terburuk untuk penduduk yang berkemah dari Desember hingga Januari Dalam versi yang terakhir dimutakhirkan, topik ini diletakkan dalam Lampiran.

5. Tinjauan Rencana Kontinjensi Tsunami Terpilih

Perencanaan Kontinjensi sebagaimana yang diuraikan di atas menggambarkan tiga proses kegiatan utama. Pertama, proses persiapan, diantaranya menentukan pelaku kelembagaan dan mekanisme koordinasi selama proses pengembangan penyusunan rencana. Kedua, proses pengembangan rencana, diantaranya menentukan isi dokumen rencana kontinjensi yang mencakup analisis bahaya dan kerentanan, pengembangan skenario, identifikasi sumber daya dan strategi operasi, sistem dan prosedur peringatan dini, dan rencana tanggapan. Ketiga, proses adaptasi pengembangan, diantaranya menentukan sebuah perencanaan untuk konsolidasi, pengaktifan, dan tindak lanjut.

Rencana kontinjensi tsunami yang dikembangkan oleh Indonesia, Gisborne, dan Fort Bragg mencerminkan ketiga proses di atas dan mencakup setidaknya delapan topik utama:

1. Pelaku kelembagaan, tujuan & cakupan;
2. Analisis risiko & penetapan prioritas;
3. Pengembangan skenario;
4. Identifikasi sumber daya dan strategi operasi yang mencakup tanggung jawab & cakupan area;
5. Sistem & prosedur peringatan;
6. Rencana sektor saat menerima peringatan tsunami & prosedur pemberitahuan kepada publik;
7. Prosedur evakuasi;
8. Pemantauan, pengujian & evakuasi rencana.

a. Pelaku Kelembagaan, Tujuan & Cakupan

Fort Bragg berlokasi di Mendocino County, California, AS. Rencana Kontinjensi dikembangkan dalam kerangka kerja Rencana Tanggap Tsunami dan Sistem Manajemen Kedaruratan yang Dibakukan (SEMS). Kantor Gubernur untuk Layanan Kedaruratan (OES) yang didukung oleh Badan Manajemen Kedaruratan Federal (FEMA) dan Administrasi Kelautan dan Angkasa Nasional (NOAA) telah menyediakan Panduan berjudul "*Local Planning Guidance on Tsunami Response*" (Perencanaan Lokal untuk Tanggap Tsunami) guna membantu pemerintah setempat dalam pengembangan awal rencana dan prosedur tanggap tsunami yang perlu untuk menghadapi dampak tsunami pada masyarakatnya. Sejalan dengan panduan di atas, maksud rencana kontinjensi tsunami Departemen Kepolisian Fort Bragg adalah untuk berfokus pada prosedur yang akan digunakan selama kejadian Waspada Tsunami dan menangani evakuasi publik.

Rencana Kontinjensi Tsunami untuk Distrik Gisborne di Selandia Baru dikembangkan menurut kerangka kerja Perintah Rencana Pertahanan Sipil dan Manajemen Kedaruratan Nasional 2005 (*National CDEM Plan*); Panduan untuk Rencana Pertahanan Sipil dan Manajemen Kedaruratan Nasional 2006 (*Guide to National CDEM Plan*) dan rencana-rencana CDEM Group. Rencana kontinjensi tsunami ini adalah prosedur gabungan yang akan digunakan Layanan Kedaruratan Distrik Gisborne, yang dikenal sebagai Kepolisian, Pemadam Kebakaran, Kesehatan, dan Pertahanan Sipil, dan akan digunakan bersama dan terkordinasi dalam kegiatan tanggap darurat.

Rencana Kontinjensi Tsunami untuk kabupaten-kabupaten di Indonesia dikembangkan menggunakan Pedoman Nasional Pengembangan Perencanaan Penanggulangan Bencana (2008), yang baru-baru ini telah diterjemahkan sebagai buku Panduan Perencanaan Kontinjensi. Pengembangan rencana kontinjensi tsunami untuk tingkat kabupaten didukung langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui kerjasama dengan pemerintah setempat.

b. Analisis Risiko & Penetapan Prioritas

Pada tahap analisis risiko, semua rencana kontinjensi tsunami, melibatkan pengumpulan informasi yang cukup mengenai bahaya tsunami jauh dan/atau lokal beserta kemungkinan dampaknya.

Rencana kontinjensi tsunami Fort Bragg tidak membahas lebih jauh tentang analisis risiko. Akan tetapi, dalam dokumen terpisah, Panduan Perencanaan Lokal untuk Tanggap Tsunami mencakup topik ini. Sesuai dengan panduan itu, penggunaan Peta Model Genangan adalah perlu sebagai dasar untuk rencana tanggap tsunami. Peta genangan untuk setiap area yang terancam tsunami menunjukkan kemungkinan genangan maksimum tsunami berdasarkan peta Gabungan Bahaya Geoteknik Elemen Keselamatan Seismik dari Rencana Umum County, dan berdasarkan informasi terkini lainnya. Peta model genangan di tempatkan (*overlay*) ke dalam peta lokal dan

hasilnya akan menjadi dasar untuk mengidentifiaksi prioritas tanggapan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu di ambil untuk mengurangi potensi bahaya. Taksirannya juga dapat digunakan untuk menentukan dimana kerusakan cenderung terjadi, area dan segmen populasi yang terpapar risiko terbesar, dan mengembangkan jalur evakuasi dengan rencana kendali lalu lintas. Dokumen rencana kontinjensi tsunami Fort Bragg di dalamnya mengindikasikan beberapa area sebagai tingkat elevasi aman dari tsunami (di atas 60 kaki) dan mengidentifikasikan beberapa daerah yang berada di bawah 60 kaki tingkat elevasi. Pengaturan khusus untuk pemberitahuan pada masyarakat dan kontrol trafik juga di bahas.

Rencana Kontinjensi Tsunami untuk Distrik Gisborne mencamtumkan penjelasan mengenai dampak pada distrik, berisi informasi dasar tentang bahaya tsunami; gempa bumi yang bisa menimbulkan tsunami jauh dan atau lokal di dalam konteks Distrik Gisborne**;** skenario untuk pantai timur, distrik, dan kota**,** serta uraian aset dan area rentan yang bergantung pada ukuran gelombang yang dibangkitkan oleh tsunami lokal/jauh, yang untuk itu, telah dilakukan kerja yang lumayan besar dalam kesiapsiagaan dan kesadaran tentang evakuasi, dan skenario terburuk untuk populasi berkemah dari Desember hingga Januari.

c. Skenario Sebagai Dasar untuk Rencana Kontinjensi Tsunami

Semua rencana menunjukkan bahwa skenario tertetu telah dikembangkan, yang digunakan untuk menetapkan tujuan dan strategi intervensi. Beberapa skenario untuk tsunami lokal dan jauh dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai bentuk kejadian darurat yang diramalkan menggunakan dimensi-dimensi waktu, ruang, dan magnitud sebagai parameter.

Fort Bragg menggunakan jenis pesan peringatan yang diterbitkan oleh Pusat Peringatan Tsunami Pantai Barat dan Alaska (WCATWC) sebagai parameter intervensi. Lima jenis pesan WCATWC adalah: Pesan Informasi - *Information Message* (di bawah 6,5 SR); Belutin Informasi - *Information Bulletin* (lebih dari 6,5 SR namun kurang dari ambang peringatan); Buletin Advis - *Advisory Bulletin* (peringatan tsunami dari PTWC ke WCATWC tentang peringatan tsunami ke seluruh cekungan Samudera Pasifik namun cukup jauh atau tsunami tidak menghadirkan ancaman); Buletin Waspada - *Watch Bulletin* (jika gempa bumi > 7 SR, area waspada adalah satu jam waktu perjalanan tsunami dari batas zona peringatan; atau jika gempa bumi > 7,5 SR, area waspada adalah tiga jam waktu perjalanan tsunami); Buletin Peringatan - *Warning Bulletin* (gempa di dalam area tanggung jawab WCATWC di atas 7,0 SR yang meliputi area-area di dalam dua jam waktu perjalanan tsunami dari episentrum, dan jika di atas 7,5 SR meliputi hingga area-area di dalam tiga jam waktu perjalanan tsunami dari episentrum). Uraian lebih jauh tentang sistem kewaspadaan dan peringatan tsunami tersedia dalam dokumen terpisah berjudul "*Local Planning Guidance on Tsunami Response*".

Gisborne menggunakan pesan peringatan yang diterbitkan oleh Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (PTWC) sebagai parameter intervensi. Pemicu utama bagi putusan adalah waktu kedatangan dan ketinggian pada Pulau Easter dan Chatham

Indonesia mengembangkan skenario berdasarkan tanda peringatan alami dan interpretasi kemungkinan dampak kejadian tsunami berdasarkan data historis yang tersedia. Peringatan dini resmi dari InaTEWS tidak teridentifikasi di dalam dokumen.

Skenario untuk tsunami lokal: Lebih jauh lagi, peringatan untuk tsunami lokal sangat mungkin tidak diterbitkan oleh WCATWC dan PTWC. Karena itu, Distrik Gisborne dan Fort Bragg menunjukkan dalam strategi mereka dorongan untuk evakuasi diri dalam kejadian tsunami lokal.

d. Sistem & Prosedur Peringatan Dini

Kecuali rencana kontinjensi yang ada di Indonesia, jenis peringatan yang dihasilkan oleh pusat peringatan adalah digunakan sebagai informasi garis dasar, khususnya untuk pengembangan skenario. Penafsiran yang hati-hati atas tanda-tanda peringatan dini dibutuhkan untuk memverifikasi informasi dan menganalisis implikasinya dan memicu pelaksanaan rencana kontinjensi.

Di Fort Bragg, pemerintah setempat bertanggung jawab menjelaskan **prosedur peringatan tsunami** kepada publik. Perlu diperjelas di sini bahwa Pusat Peringatan Tsunami Pantai Barat dan Alaska di Alaska (**WC/ATWC**) dan Pusat Peringatan Pasifik (**PTWC**) menerbitkan pesan dan buletin peringatan tsunami, namun mereka tidak melakukan analisis kemungkinan dampak tsunami. Semua informasi yang diterima disebarkan langsung ke pusat operasi kedaruratan daerah (*Operational Area*) melalui beberapa jenis metode komunikasi seperti CLETS, CALWAS (Sistem Kewaspadaan dan Peringatan California), dan EAS (Sistem Kewaspadaan Darurat). Sebagai bagian dari rencana tsunaminya, pusat operasi kedaruratan daerah harus mengembangkan **prosedur untuk menyebarkan informasi** kepada yurisdiksi lokal dan distrik tertentu. Pemerintah setempat harus bekerjasama dengan pusat operasi kedaruratan daerah untuk **mengembangkan elemen-elemen sistem penyebaran peringatan**.

Untuk kasus Gisborne, PTWC adalah badan yang menerbitkan peringatan yang diteruskan langsung ke Kementerian Pertahanan Sipil & Manajemen Kedaruratan (MCDEM) Selandia Baru, yang pada gilirannya meneruskan ke Pertahanan Sipil di tingkat daerah dan Polisi, yang kemudian mengirimkannya ke Kantor Manajemen Kedaruratan agar mengambil tindakan yang selayaknya.

e. Prosedur Evakuasi

Tidak seperti di Indonesia, perencanaan kontinjensi tsunami untuk Fort Bragg dan Distrik Gisborne menunjukkan pelibatan manajemen senior di semua tingkat. Selain itu, prosedur evakuasi divisualkan dengan jelas, suatu hal yang tidak ada dalam dokumen-dokumen yang difasilitasi BNPB.

6. Kesimpulan

Rencana kontinjensi tsunami mencakup secara umum delapan topik utama: 1) pelaku kelembagaan, tujuan & cakupan; 2) analisis risiko & penetapan prioritas; 3) pengembangan skenario; 4) identifikasi sumber daya dan strategi operasi yang mencakup tanggung jawab & cakupan area; 5) sistem & prosedur peringatan; 6) rencana sektor saat menerima peringatan tsunami & prosedur pemberitahuan kepada publik; 7) prosedur evakuasi; 8) pemantauan, pengujian & evakuasi rencana.

Skenario yang cukup terinci digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kontinjensi dan perlu memberikan ruang untuk adaptasi, karena skenario yang disiapkan sebelumnya dan disusun oleh para pakar dalam rencana kontinjensi, dapat berbeda dari kejadian bencana yang sebenarnya.

Rencana tertulis itu penting, namun tanpa proses perencanaan kontinjensi yang baik dapat membuat upaya tidak efektif. Sebuah rencana kontinjensi tsunami bukanlah semata kegiatan teknis, melainkan sebagai suatu fungsi manajemen, karena telah terbukti secara konsisten bahwa pelibatan manajemen senior di semua tingkat menghasilkan proses perencanaan kontinjensi yang efektif dan tanggap darurat yang lebih baik.

Peringatan dini merupakan alat penting untuk menentukan pengambilan tindakan secara detil. Perencanaan kontinjensi berubah menjadi aksi terencana ketika peringatan dini keluar dan mengindikasikan bencana akan segera tiba.

7. Referensi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB), "Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana", Juli 2008, tersedia di internet di http://www.bnpb.go.id/website/

Inter-Agency Standing Committee (IASC), "Inter-Agency Contingency Planning Guidelines for Humanitarian Assistance", November 2007, tersedia di internet di www.reliefweb.int atau www.humanitarianinfo.org/iasc

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (The International Federation), "Disaster Response and Contingency Planning Guide", 2007, tersedia di internet di www.ifrc.org

Workshop Report and Working Group Output", UN, "Post-Tsunami Lesson Learned and Best Practices", Jakarta 16-17 May 2005

John Twigg, Richard Choularton, "The Asian Tsunami: The Implication for Preparedness and Contingency Planning", Januari 2005, tersedia di internet di www.odihpn.org

UNHCR & NDCC, "Contingency Planning for Emergencies", A Manual for Local Government Units, edisi kedua, Mei 2003

UNHCR, "Contingency Planning", Modul Belajar Mandiri, Maret 2000

Governor's Office of Emergency Services, "Local Planning Guidance on Tsunami Response", edisi kedua, Mendocino County, California

Inter-Agency Standing Committee (IASC), “Draft, Indonesia Inter-Agency Contingency Plan”, 2008

Kabupaten Bantul, “Rencana Kontinjensi Tsunami”, November 2007

Sumtera Barat, “Rencana Kontinjensi Tsunami”, Maret 2008

Kabupaten Muko-Muko, “Rencana Kontinjensi Tsunami”, Agustus 2008

Provinsi Bengkulu, “Rencana Kontinjensi Tsunami”, Februari 2009

Kabupaten Gunungkidul, “Rencana Kontinjensi Tsunami”, Februari 2009

City of Fort Bragg, California, “Tsunami Contingency Plan”, diamendemen pada 4/19/2006, tersedia di internet di www.city.fortbragg.com

Gisborne District, New Zealand, “Tsunami Contingency Plan”, 18 Januari 2005, terakir diperbarui Januari 2009, tersedia di internet di http://www.civildefence.govt.nz

New South Wales, “Tsunami Emergency Sub Plan”, Desember 2008

British Columbia, “British Columbia Tsunami Notification Process Plan”, Juni 2008

Official’s Committee for Domestic and External Security Coordination, “National Hazardscape Report”, September 2007, tersedia di internet di http://www.civildefence.govt.nz

CARE, “CARE Contingency Planning”, versi 3, Oktober 2006

Kontak:

Kerjasama Indonesia-Jerman untuk
Sistem Peringatan Dini Tsunami (GITEWS)
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal

GTZ-International Services
Menara BCA, lantai 46
Jalan MH Thamrin No 1
Jakarta 10310
Indonesia

T: +6221 23587571
F: +6221 23587570

www.gitews.org